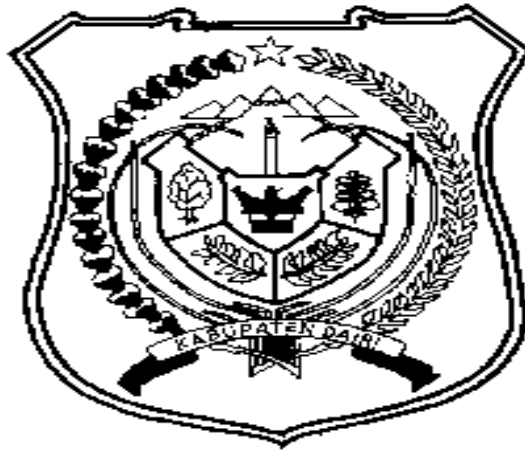


**RENCANA KERJA  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
2022**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
	1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD</b> .....	<b>6</b>
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
	2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	16
	2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah .....	17
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	<b>25</b>
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	25
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	25
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	<b>27</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>35</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, juga harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa penyusunan Renja dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Dokumen Renja yang disusun memuat evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2022 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 . Visi misi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD diterjemahkan kedalam Renstra lima tahunan bagi Perangkat Daerah dan dokumen RKPD tahunan daerah.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi pada prinsipnya berorientasi kepada proses dengan melakukan berbagai pendekatan

untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas. Penyusunannya juga berupaya mensinergikan dan memperhatikan keberadaan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM/Renstra pada Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Sumatera Utara, Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Utara, serta dokumen lainnya yang berhubungan.

Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2023 sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
  19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Renja ini disusun dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renja disusun berdasarkan analisis kondisi obyektif untuk

memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah. Dari gambaran tersebut akan memberikan pemahaman terkait tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah saat ini serta perkiraan kondisi yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah sebagai berikut;

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban serta evaluasi setiap program, kegiatan, serta pembiayaan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, bermanfaat, partisipatif, efektif, transparan, akuntabel dan berkesinambungan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
3. Mempermudah evaluasi kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah;
4. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Renja Tahun 2023 sebagai berikut;

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun yang lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun yang lalu merupakan kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan capaian Tahun 2023, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disajikan dalam Tabel 2.1. Berikut :



Tabel 2.1.  
**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD  
 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d 2022  
 KABUPATEN DAIRI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/(Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-2)	Target dan Realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan tahun 2021 (tahun lalu/n-1)			Target Program/ Kegiatan Renja tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=(7/5)</i>	<i>9</i>	<i>10=(5+7+9)</i>	<i>11=(10/4)</i>
<b>1.05.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerint-tahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	Terlayannya Admistrasi Perkantoran	100%							
2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	75%

	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	21 Laporan	75%
	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	124 Orang	33 Orang	31 Orang	31 Orang	100%	30 Orang	125 Orang	75%
	<b>2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Barang Milik daerah yang mempunyai ijin	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	30%
	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	80%
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	364 stel	-	-	-	-	112 Stel	112 Stel	31%
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15 Orang	-	-	-	-	5 Orang	5 Orang	33%

	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
	01	Penyediaan komponen Instalansi listrik/ penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang Disediakan	4 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	50%
	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	50%
	05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	50%
	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	332 Dokumen	-	81 Dokumen	81 Dokumen	100%	81 Dokumen	162 Dokumen	49%
	09	Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	975 Laporan	-	235 Laporan	235 Laporan	100%	250 Laporan	485 Laporan	50%
	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Persentase pemenuhan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	50%
	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100%	19 unit	23Unit	72%

	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	87 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100%	73 unit	77Unit	88%
	2.08	<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	50%
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	50%
	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	48 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	50%
	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerinta-han</b>	Persentase barang Milik daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	50%
	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka Pajak dan Perizinannya	40 unit	-	10 unit	10 unit	100%	10 unit	20 unit	50%
	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	50%
	11	Pemeliharaan / rehabilitasi pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 unit	-	8 unit	8 unit	100%	8 unit	16 unit	50%

<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRA-MAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah</b>	95%	-	80%	80%	100%	85%	85%	85%	
		<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3</b>	75%	-	60%	60%	100%	65%	65%	65%	
	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	75%	-	60%	60%	100%	65%	65%	65%
	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	335 Kasus	-	25 Kasus	25 Kasus Orang	100%	120 Kasus	175 Kasus	52%
	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum erdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	6 Kasus	-	6 Kasus	6 Kasus	100%	-	100%	100%
	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen objek	100%	-	100%	100%

	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	60%
	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	397 Orang	-	60 Orang	60 Orang	100%	108 Orang	168 Orang	42%
	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	25%
	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	288 Unit	-	-	-	-	56 Unit	56 Unit	20%
	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	50%
	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	95%	-	80%	80%	100%	85%	85%	85%
	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	45 Laporan	-	-	-	-	15 Laporan	15 Laporan	33%

02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali	136 Laporan	-	30 Lapoan	30 Laporan	100%	-	30 Laporan	22%
03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	137 Laporan	-	30 Lapoan	30 Laporan	100%	40 Laporan	70 Laporan	51%
04	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Dairi Yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	4 Orang	-	-	-	-	-	-	-

## **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.**

Wilayah Kabupaten Dairi yang begitu luasnya dimana terdiri dari 15 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 161 Desa serta sumber Daya Alam dan kondisi Demografis Penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkin menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban.

Dalam menyelenggarakan Fungsi dan Tugas Pokok untuk mewujudkan Ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Dairi, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan Profesional dalam melaksanakan Tugas dan selalu tampil terdepan sebagai motivator. Analisa Atas Pencapaian Sasaran Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab.

Indikator Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja ada 3 (tiga) yaitu :

1. Cakupan lingkungan yang aman dan nyaman  
Kinerja Cakupan Lingkungan yang aman dan nyaman dapat dicapai dari Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun di Kantor
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)  
Kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pedagang bergerak lainnya serta Kegiatan Penertiban Gelandangan dan Pengemis
3. Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah  
Kinerja Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Perda, Perbub dan Peraturan lainnya serta Kegiatan Pencegahan berkembangnya praktek prostitusi, penggunaan minuman keras dan narkoba

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 2.2 berikut :



Tabel 2.2  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN DAIRI**

No	Indikator	Standart Pelayanan Minimal/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12	13
	Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat													
1	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	95%		-	80%	85%	90%	95%	-	80%	85%	90%	95%	
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	75%		-	60%	65%	70%	75%	-	60%	65%	70%	75%	

### **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Rencana kerja yang disusun dan akan dilaksanakan pada tahun 2023 tidak terlepas dari analisis strategis terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi, mencakup Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Dairi. Berikut ini aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi Berdasarkan situasi dan kondisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik dari segi fisik maupun non fisik mempunyai hal - hal Yang sangat mempengaruhi kinerjanya sebagai lembaga Pemerintah yang bersifat pelayanan Umum, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna terciptanya keamanan, ketertiban, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang – undangan yang berlaku, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain ;

- a. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas; dukungan Sumber Daya Manusia belum optimal; jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan.
- b. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah.
- c. Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi tidak maksimal.

- d. Masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah**

Dalam menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Akhir, maka diperlukan review terhadap rancangan awal RKPD agar terwujudnya keselarasan dan kesesuaian antar dokumen perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat terwujud. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat akan melaksanakan misi keempat, yaitu: “Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintah yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah”. Dengan tujuan pertama, yaitu: “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government)”. Selanjutnya sasaran keempat yaitu: “Meningkatnya kualitas ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”.

Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat diuraikan pada Tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3.  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023  
KABUPATEN DAIRI

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
1	05				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					14.760.045.183	
1	05	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					9.077.545.183	
1	05	01	2,01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					22.000.000	
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Dairi, Sidikalang	2 Dokumen	11.000.000	Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Dairi, Sidikalang	7 Laporan	11.000.000	Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					3.491.634.319	
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Dairi, Sidikalang	30 Orang/bulan	3.491.634.319	Dana Alokasi Umum	

<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>11.000.000</b>		
1	05	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Dairi, Sidikalang	1 Dokumen	11.000.000	Dana Alokasi Umum	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>194.491.000</b>		
1	05	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Dairi, Sidikalang	128 Paket	161.491.000	Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Dairi,	5 Orang	33.000.000	Dana Alokasi Umum	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>567.268.570</b>		
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang	1 Paket	4.903.690	Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang	1 Paket	91.006.740	Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang	1 Paket	7.226.340	Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang	76 Dokumen	8.448.000	Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Dairi, Sidikalang	250 Laporan	455.683.800	Dana Alokasi Umum	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.783.472.000</b>		
1	05	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang	3 Unit	1.300.000.000	Dana Alokasi Umum	

1	05	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang	1 Unit	360.000.000	Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang	16 Unit	30.000.000	Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang	10 Unit	93.472.000	Dana Alokasi Umum	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.788.784.197</b>		
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang	12 Laporan	18.150.965	Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang	12 Laporan	2.770.633.232	Dana Alokasi Umum	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>218.895.097</b>		
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Dairi, Sidikalang	10 Unit	190.944.097	Dana Alokasi Umum	

1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Dairi, Sidikalang	1 Unit	22.374.000	Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	8 Unit	5.577.000	Dana Alokasi Umum	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>5.682.500.000</b>		
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2,01</b>		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>4.322.500.000</b>		
1	05	02	2,01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Kasus	625.000.000	Dana Alokasi Umum	
1	05	02	2,01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.550.000.000	Dana Alokasi Umum	

1	05	02	2,01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Orang	350.000.000	Dana Alokasi Umum	
1	05	02	2,01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150.000.000	Dana Alokasi Umum	
1	05	02	2,01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	44 Unit	412.500.000	Dana Alokasi Umum	
1	05	02	2,01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	235.000.000	Dana Alokasi Umum	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2,02</b>		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>				<b>1.235.000.000</b>		
1	05	02	2,02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Laporan	235.000.000	Dana Alokasi Umum	



1	05	02	2,02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	650.000.000	Dana Alokasi Umum	
1	05	02	2,02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	350.000.000	Dana Alokasi Umum	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2,03</b>		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>				<b>125.000.000</b>		
1	05	02	2,03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	125.000.000	Dana Alokasi Umum	
<b>TOTAL</b>									<b>14.760.045.183</b>		

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menyukseskan pembangunan daerah Kabupaten Dairi, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi perlu didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Sehubungan hal tersebut, pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana kerja akhir ke beberapa usulan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi. Usulan dari pemangku kepentingan bisa didapatkan melalui pengumpulan data dan informasi dari rapat – rapat seperti dalam acara sosialisasi PERDA. Kemudian melalui koordinasi dan konsolidasi program dengan kegiatan dengan pemangku kepentingan serta pengamatan dilapangan. Selanjutnya usulan tersebut harus ditelaah yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dan program prioritas pembangunan daerah.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Program merupakan Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Penetapan Tujuan dan sasaran didasarkan pada indentifikasi factor – factor kunci keberhasilan ( Critikal Succes Factor ) yang telah ditetapkan setelah penetapan visi dan misi, penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi sedangkan sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Visi merupakan pandangan jauh kedepan ke mana dan bagaimana instansi Pemerintah harus di bawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menegakan Peraturan Daerah ( perda ), Keputusan Bupati Dairi dan Peraturan Perundang –undangan lainnya.

Tujuannya : Mewujudkan masyarakat dan Aparatur dan badan hukum di Kabupaten Dairi Yang patuh dan taat pada peraturan Perundang – Undangang yang berlaku dan tidak melanggar Peraturan dan Produk hukum lainnya serta mampu menjunjung tinggi supremasi hukum.

Sasaran : Penertiban terhadap setiap pelanggaran Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang – undangan lainnya.

2. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman baik untuk Aparatur Pemerintah maupun masyarakat.

Tujuannya : Menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, tentram serta menjadikan masyarakat yang berakhlak mulia.

Sasaran : a. Penjagaan dan Pengamanan dilingkungan perkantoran , Rumah Dinas Pejabat Daerah, lokasi kegiatan acara Pemerintah Daerah.

b. Sosialisasi atau Penyuluhan kepada masyarakat tentang produk hukum yang telah dibuat dan ditetapkan Pemerintah Daerah.

c. Mengamankan aksi anarkis atau demonstrasi.

d. Melaksanakan perlindungan masyarakat pada kondisi normal atau pada saat terjadi bencana alam.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam peningkatan Pengembangan kapasitas dan kualitas kinerja.

Tujuannya : Peningkatan Sumber Daya manusia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Dairi yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai.

Sasaran : a. Mewujudkan peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam menangani permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan lainnya.

b. Mewujudkan peningkatan pengetahuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dibidang Peraturan Perundang – undangan.

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana secara kualitatif dan kuantitatif.

Tujuannya : Peningkatan Sarana dan Prasarana baik secara kuantitatif dan kuanlitatif.

Sasaran : Mewujudkan kegiatan pengawalan dan pengamanan berjalan dengan lancar.

5. Mewujudkan situasi yang aman dan terkendali

Tujuannya : Peningkatan - peningkatan situasi keamanan yang kondusif dan terkendali ditengah masyarakat.

Sasaran : a. Mewujudkan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi yang tanggap terhadap permasalahan di masyarakat yang berkait dengan ketentraman dan ketertiban umum dan mendorong terciptanya situasi yang aman dan terkendali.

b. Mewujudkan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi yang mampu memberikan pertolongan setiap kejadian yang perlu mendapat Pertolongan.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi untuk mewujudkan Visi misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi. Visi Pemerintah Kabupaten Dairi dijabarkan sebagai berikut:

‘‘ MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT  
DALAM HARMONI KEBERAGAMAN’’

Untuk memenuhi visi tersebut , Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Mempunyai misi 4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (kepemerintahan yang baik) dan clean government (Pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu melalui :

1. Menegakan Peraturan Daerah ( Perda ), Keputusan Bupati Dairi dan Peraturan Perundang – undangan lainnya.
2. Penyelenggarakan Keamanan, Ketertiban Umum dan ketentraman baik untuk Aparatur Pemerintah maupun masyarakat.
3. Meningkatkan Sumber Daya manusia ( SDM ) Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam peningkatan Pengembangan Kapasitas dan kualitas Kinerja.
4. Meningkatkan sarana dan Prasarana secara kualitatif dan kuantitatif.
5. Mewujudkan situasi yang aman dan terkendali.

Penyusunan Program dan Kegiatan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kondisi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan serta pengelolaan keuangan Daerah.

Program dan kegiatan yang dituangkan dari Visi, Misi, kebijakan yang telah dituangkan Sebelumnya diatas ada 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dan pengembangan program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi sehingga pengembangan program akan menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan kepada Masyarakat. Adapun kegiatan pada setiap urusan dirinci dalam kegiatan Rencana Kerja Anggaran. Adapun Rencana kerja Anggaran adalah kegiatan Pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri.

Adapun Uraian Program dan Kegiatan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi yang direncanakan pada Renja Tahun 2023 adalah seperti terangkum dalam Tabel 4.1 tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2023 dan Prakiraan maju Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi berikut :

Tabel 4.1  
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi  
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
1	05		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					<b>15.068.048.638</b>				
1	05	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>9.949.298.638</b>				
1	05	01	2,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>24.200.000</b>				
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	2 Dokumen	11.000.000			12.100.000
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	7 Laporan	11.000.000			12.100.000

<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>3.491.634.319</b>			<b>3.840.797.750</b>
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	30 Orang/bulan	3.491.634.319			3.840.797.750
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>11.000.000</b>			<b>12.100.000</b>
1	05	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	1 Dokumen	11.000.000			12.100.000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>194.491.000</b>			<b>213.940.100</b>
1	05	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	128 Paket	161.491.000			177.640.100
1	05	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	33.000.000			36.300.000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>567.268.570</b>			<b>623.995.427</b>
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	1 Paket	4.903.690			5.394.059
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	1 Paket	91.006.740			100.107.414
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	1 Paket	7.226.340			7.948.974
1	05	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	76 Dokumen	8.448.000			9.292.800



1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	250 Laporan	455.683.800			501.252.180
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.783.472.000</b>			<b>1.925.819.200</b>
1	05	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	2 Unit	1.300.000.000			1.430.000.000
1	05	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	1 Unit	360.000.000			360.000.000
1	05	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	16 Unit	30.000.000			33.000.000
1	05	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	10 Unit	93.472.000			102.819.200
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.788.784.197</b>			<b>3.067.661.555</b>
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	12 Laporan	18.150.965			19.965.000
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	12 Laporan	2.770.633.232			3.047.696.555

<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>218.895.097</b>		<b>240.784.606</b>
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	10 Unit	190.944.097		210.038.507
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	1 Unit	22.374.000		24.611.400
1	05	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	8 Unit	5.577.000		6.134.699
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>5.682.500.000</b>		<b>5.118.750.000</b>
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2,01</b>		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>4.322.500.000</b>		<b>3.647.750.000</b>
1	05	02	2,01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Kasus	625.000.000		715.000.000
1	05	02	2,01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.550.000.000		1.500.000.000

1	05	02	2,01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Orang	350.000.000			385.000.000
1	05	02	2,01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150.000.000			165.000.000
1	05	02	2,01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	44 Unit	412.500.000			624.250.000
1	05	02	2,01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	235.000.000			258.500.000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2,02</b>		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>				<b>1.235.000.000</b>			<b>1.333.500.000</b>
1	05	02	2,02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Laporan	235.000.000			258.500.000

1	05	02	2,02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	650.000.000			700.000.000
1	05	02	2,02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	350.000.000			375.000.000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2,03</b>		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>				<b>125.000.000</b>			<b>137.500.000</b>
1	05	02	2,03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	125.000.000			137.500.000
<b>TOTAL</b>									<b>14.760.045.183</b>			<b>15.068.048.638</b>

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi merupakan salah satu komponen untuk memberhasilkan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Rencana kerja yang telah disusun ini diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, partisipatif dengan penuh tanggung jawab dan menjadi pedoman untuk peningkatan kinerja yang merupakan cerminan apresiasi masyarakat.

Semoga penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2023 mendapat dukungan dari masyarakat, pelaku usaha, badan hukum serta instansi terkait untuk tercapainya peningkatan persentase Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dan Kabupaten Dairi yang aman dan nyaman.

Untuk memberhasilkan rencana kerja ini, dibutuhkan perhatian yang serius dari seluruh lapisan masyarakat dan kerjasama dengan perangkat daerah agar penegakan peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi secara rutin dapat terlaksana dengan baik dengan terus menerus sesuai dengan yang telah direncanakan.

Demikian diharapkan kepada seluruh Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI serta masyarakat untuk menyatukan persepsi guna mendukung peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Dairi.

Sidikalang, 01 Juni 2022

  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN DAIRI,  
Drs. JUNIHARDI D.R. SIREGAR, MM  
REMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196906031990091001